

Roby. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur. *Vol. 1(2). 161-165*

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur

Roby*

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

21 Mei 2020

Received in revised form:

17 Juni 2020

Accepted:

14 Juli 2020

Keyword:

East Kutai, Social Services, POM, PSKS, Social Welfare

Kata Kunci:

Kutai Timur, Dinas Sosial, PMKS, PSKS, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the factors that affect employee performance in improving the implementation of tasks in the Social Welfare Office of East Kutai Regency. People with Social Welfare Problems (PMKS) is a person, family, or community group who due to an obstacle, difficulty, or disorder cannot carry out their social functions so that their needs are not met both physically, spiritually, and socially adequately and reasonably. While the Potential and Source of Social Welfare (PSKS) is the potential and resources that exist in humans, nature and social institutions that can be used for social welfare efforts. Autonomy and Assistance Duties in accordance with East Kutai Regency Regional Regulation No. 6 of 20013 in the field of Social Welfare, are: a). Formulation of policies in the field of Social Welfare; b). The implementation of government affairs and public services in the field of social welfare and community protection; c) The construction and implementation of social welfare and the protection of society; c) The implementation of other duties given by the Regent in accordance with its duties and functions. Some social problems in the main problems of the East Kutai Regency Social Service are a). Poverty problem; b) Low quality of human resources; c) Economic inequality around industrial estates; d) Decrease in the quality of the environment; Gap e). inter-regional and inter-regional development. The purpose of the medium-term work program of the East Kutai regency social service can be formulated as follows: a). The realization of quality social welfare human resources; b) The realization of good service with strategic collaboration; c). The realization of regional cooperation in the East Kalimantan region to realize East Kutai Regency as a free area on social welfare issues; d). The realization of coordination with vertical agencies for the optimization of funding sources; e). The realization of the improvement and equitable distribution of Social Services is fairer and more equitable.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Otonomi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 20013 di bidang Kesejahteraan Sosial, adalah : a). Perumusan kebijakan dalam bidang Kesejahteraan Sosial; b). Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat; c). Pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat; c). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa masalah sosial dalam permasalahan pokok Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur adalah : a). Masalah Kemiskinan ; b). Rendahnya kualitas sumber daya manusia ; c). Kesenjangan ekonomi di sekitar kawasan industri ; d). Penurunan kualitas lingkungan hidup ; Kesenjangan e). bangunan antar dan inter wilayah. Tujuan program kerja jangka menengah dinas sosial Kabupaten Kutai Timur dapat dirumuskan sebagai berikut : a). Terwujudnya sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yang berkualitas; b). Terwujudnya pelayanan yang baik dengan kolaborasi yang strategis; c). Terwujudnya kerjasama regional di kawasan Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah yang bebas terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial; d). Terwujudnya koordinasi dengan instansi vertikal guna optimalisasi sumber pendanaan; e). Terwujudnya peningkatan dan pemerataan Pelayanan Sosial yang lebih adil dan merata.

* Corresponding author: Roby@untag-smd.ac.id

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah, dimana di dalam era reformasi memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas bangsa Indonesia sedang giat-giatnya membangun secara terencana dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, social budaya dan bidang pertahanan keamanan. Rencana pembangunan tersebut telah ditetapkan dalam tujuan Nasional negara yaitu untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan aparatur negara yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap negara dan pemerintah, serta berwibawa, berdayaguna, berkualitas tinggi, dan sadarakan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, (Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974), tentang Pokok- pokok Kepegawaian, sebagai berikut : Kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dijelaskan pula dalam pasal 8, sebagai berikut:

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang di percayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah dan pelaksana pembangunan, yang memiliki wibawa, berdayaguna, berkualitas tinggi, dan sadarakan tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi atau kantor dalam usahanya untuk mencapai tujuan perlu ditunjang oleh beberapa unsur yang ada didalamnya. Para pelaksana tugas atau dalam hal ini pegawai suatu kantor harus memiliki dedikasi yang tinggi, prestasi kerja yang tinggi serta bertanggungjawab dan didukung pula oleh pengadaan sarana fisik kantor lainnya yang turut memperlancar kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa faktor kinerja pegawai memang benar-benar sangat diperlukan untuk meningkatkan dan menumbuhkan pelaksanaan dalam lingkungan kerja pegawai.

Berpijak dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : ***Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur ?***

Pembahasan

Menurut Rivai (2009:367), ada beberapa pengertian mengenai analisis pekerjaan, yaitu : *Pertama*, Analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkan, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi atau pengendalian, dan organisasi atau perusahaannya. *Kedua*, Analisis pekerjaan merupakan kegiatan atau proses dalam menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas- tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis suatu perusahaan. *Ketiga*, Analisis pekerjaan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut.

Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pembuatan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dalam prosesnya, analisis jabatan pekerjaan harus dilaksanakan secara terencana, dan berdasar pada tujuan yang dimiliki oleh setiap organisasi. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur yang benar dalam pelaksanaannya. Menurut Sinambela, dkk (2012) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya

Dalam mencapai kinerja pegawai yang demi tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan motivasi kerja dikalangan pegawai. Adanya motivasi dari organisasi dalam arti memberi motif atau dorongan kepada para pegawai. Pemberian motif merupakan proses motivasi kepada para pegawai sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja itu sendiri dan sebagai evaluasi kerja. Untuk melakukan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan yang akan dicapai. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas.

Berhasilnya pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Timur merupakan keberhasilan seluruh unsur masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah dengan segenap sikap mental, etika, profesionalisme, kejujuran, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin yang mendukung tercapainya hasil-hasil yang direncanakan.

Tingginya Populasi PMKS

Permasalahan sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat di daerah-daerah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, permasalahan sosial juga terus berkembang baik secara kuantitas dan kualitas permasalahan. Dalam hal ini semua orang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah dikategorikan sebagai *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan pandangan tersebut, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur berupaya untuk menangani berbagai masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini, tentunya diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menurunkan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan menemukenali berbagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga ditentukan arah dan tujuan seluruh kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kebijakan dan menentukan visi dan misi dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada kondisi berikutnya bahwa kesejahteraan sosial yang dimaksudkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial adalah :

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- c. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- d. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
- e. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- g. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- h. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- i. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- j. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penutup

Hasil Pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan dan merata akan meningkatkan ketahanan dan persatuan bangsa yang selanjutnya akan meratakan jalan bagi generasi berikutnya untuk mencapai masyarakat madani yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada akhirnya diharapkan perwujudan Profil Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai informasi kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Potensi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dicapai dengan program dan tujuan kerja yang efektif dan efisien dalam menangani gejala dan fenomena sosial.

Dengan adanya motivasi kerja sebagai etos kerja yang meningkatkan kemauan tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab diharuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai dampak sosial dari adanya krisis multi-dimensi yang ada dalam masyarakat.

Ketercapaian kinerja pegawai sebagai sumber pelaksana kinerja diharapkan lebih maksimal sesuai dengan peranannya dalam dinas sosial karena peranan tersebut menjadi tolak ukur tercapainya tujuan pengentasan masalah dan pencarian sumber-sumber kesejahteraan sosial.